



# RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Stasiun KIPM Jambi



# Kata Pengantar

Dalam rangka mendukung Visi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yaitu “*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya*” maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi ikut mewujudkan misi BPPMHKP yaitu :

1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang bebas dari hamadan penyakit

Adapun upaya yang dilakukan oleh Stasiun KIPM Jambi untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Jambi Tahun 2025 sebagai salahsatu dokumen perencanaan pembangunan sistem keamanan mutu hasil kelautan dan perikanan dalam jangka waktu satu tahunanggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai Stasiun KIPM Jambi Tahun 2025.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Jambi Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakansesuai dengan peruntukannya.

Jambi, 4 Februari 2025  
Kepala SKIPM Jambi



Pryan Gustaffiana, S.St.Pi, M.Si, M.H  
NIP. 19780824 200502 1 001



# Daftar Isi

**Kata Pengantar**  
**Daftar Isi**  
**Daftar Grafik**

<b>1. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1. Tugas dan Peran Organisasi .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Sasaran .....	2
<b>2.1. Rencana Strategis.....</b>	<b>3</b>
2.2. Arah Kebijakan .....	5
2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	6
2.3.2. Indikator Kinerja .....	7
2.4. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Jambi.....	10
<b>3. PENUTUP .....</b>	<b>13</b>



## Daftar Grafik

- Grafik 1. Alokasi Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi per jenis Kegiatan..... 11
- Grafik 2. Alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi per kegiatan dan per jenis belanja.....13

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian ditindaklanjuti dalam Kepmen KP Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja KKP. Peranan BPPMHKP menjadi ujung tombak pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya di lini terdepan, sebagai instrument perlindungan sumber daya hayati perikanan dan akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis BPPMHKP diwujudkan dalam menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis *scientific barrier* sesuai ketentuan mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan demikian peranan BPPMHKP mutu dan keamanan hasil perikanan dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun antar area di dalam wilayah Negara Indonesia.

BPPMHKP dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff (*tariff barrier*) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (*health, quality and safety assurance*) yang mengacu pada konsepsi *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (*traceability*) sebagai instrumen

pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “*Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure*” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsepsi *Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement* merupakan instrument pengendalian perdagangan internasional berupa hambatan teknis (*technical barrier to trade*)/ hambatan non tariff (*non tariff barrier*). Untuk itu pengembangansistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.

Dengan demikian peran BPPMHKP sangat strategis dalam ikut mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar, dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2025 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana Kinerja dan anggaran BPPMHKP Jambi tahun 2025 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025.

## **1.3. Sasaran**

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan 2025 Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Stasiun KIPM Jambi Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM BPPMHKP tahun 2025-2029 serta memberikan gambaran Kinerja yang akan dicapai oleh Stasiun Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025.

## **2.1. Rencana Strategis**

### **2.1.1 Visi dan Misi**

Pembangunan kelautan dan perikanan mempunyai peranan strategis dalam menunjang perekonomian Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan. Akan tetapi peran sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya sesuai dengan harapan khususnya dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk "Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”**”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat serta menetapkan misi antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Selain itu KKP mempunyai program Prioritas yang disebut dengan Agenda Prioritas KKP dengan 5 Kebijakan, Agenda Prioritas KKP dengan 5 Kebijakan antara lain:

1. Memperluas Kawasan konservasi laut
2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
3. Pembangunan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan
4. Pengawasan dan Pengendalian kawasan pesisir dan pulau pulau kecil
5. Pembersihan sampah plastik melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut

Kontribusi Pembangunan karantina ikan dan pengendalian mutu terhadap pembangunan kelautan dan perikanan diwujudkan dalam jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan guna meningkatkan produktivitas maupun dalam meningkatkan daya saing. Adanya perubahan tatanan global sertanasional yang dinamis semakin menuntut tersedianya hasil perikanan yang sehat, bermutu dan aman dikonsumsi.

### 2.1.2 Tujuan Strategis

Tujuan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Tujuan pembangunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas BPPMHKP adalah: “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu yang terdepan untuk memastikan keamanan, kualitas, keberlanjutan dan daya saing hasil kelautan dan perikanan, dalam rangka mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong” dengan sasaran:

1. Meningkatnya kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan di wilayah pengeluaran/pemasukan (ekspor, impor, dan antar area).
2. Menurunnya jumlah kasus penolakan/penahanan ekspor hasil perikanan per negara mitra.
3. Meningkatnya Unit Pengolahan Ikan yang memenuhi persyaratan ekspor.

## 2.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi memuat langkah-langkah yang berupa program-program indikatif untuk menyelesaikan masalah yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis. Program-program tersebut mencakup kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN yang sesuai dengan bidang Pengawasan dan Pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPMHKP. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi BPPMHKP dalam rangka mendukung perwujudan arah RPJMN 2025-2029, visi misi Presiden, serta implementasi Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, diperlukan upaya melalui strategi:
  - a. Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan kelautan dan perikanan
  - b. Jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra
2. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan melalui strategi:
  - a. Meningkatkan nilai PNBP BPPMHKP
3. Terselenggaranya system mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar melalui:
  - a. Sertifikasi ekspor yang memenuhi standar
  - b. Sertifikasi HACCP hasil perikanan
  - c. Unit Kinerja pengendali mutu hasil perikanan yang menerapkan sistem jaminan mutu
  - d. Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola, akan dilaksanakan melalui strategi:
  - a. Pengelelolaan sumberdaya manusia berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*);
  - b. Perbaikan pelayanan publik melalui penerapan Standar Pelayanan;
  - c. Peningkatan kemudahan akses dan transparansi informasi publik;
  - d. Penerapan manajemen berbasis Kinerja dan efektivitas pengelolaan anggaran.

## 2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

### 2.3.1. Sasaran Staretegis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja berdasarkan *Balaced Scorecard* (BSC) dalam rangka mewujudkan visi pembangunan BPPMHKP tersebut dibagi dalam empat prespektif antara lain :

1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan, dengan indikator Kinerja yaitu :
  - a. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - b. Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - c. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)
2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar , dengan indikator Kinerja yaitu :
  - a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
  - b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan , dengan indikator Kinerja yaitu :
  - a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
  - b. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
  - c. Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - d. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks)
  - e. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
  - f. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)

- 
- g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - h. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)
  - i. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)
  - j. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (indeks)

### **2.3.2. Indikator Kinerja**

Indikator Kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2025. Indikator Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan seiring dengan implementasi Kinerja UPT berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) adalah dengan empat perspeksi utama, antara lain:

1. Perspektif keuangan
2. Perpektis pelanggan
3. Perspektif proses bisnis
4. Perspektif pembelanjaan dan pertumbuhan

Tabel 1. Indikator Kinerja SKIPM Jambi tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup Stasiun KIPM Jambi (Lokasi)	1
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	4.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
		5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	71,5
		8.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	100
		9.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Jambi (Indeks)	87
		10.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	86
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	85
		12.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	76
		13.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup Stasiun KIPM Jambi (%)	70
		14.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Jambi (Nilai)	88

Dalam mewujudkan target indikator Kinerja utama tersebut maka akan dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan Kinerja pusat, UPT dan Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
2. Manajemen Mutu
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Pengendalian Mutu diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan (*quality and safety assurance*) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan Indonesia pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.

Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambah sampai produk tersebut dikonsumsi oleh manusia. Adanya residu antibiotik pada udang tambak, tingginya kandungan logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya *Malachite green* pada produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus tantangan bagi kelancaran ekspor produk perikanan Indonesia.

Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah unit Kinerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sehingga sasaran dari pelaksanaan program pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (*traceability*) dimana hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama penanganan, pengolahan dan distribusinya.

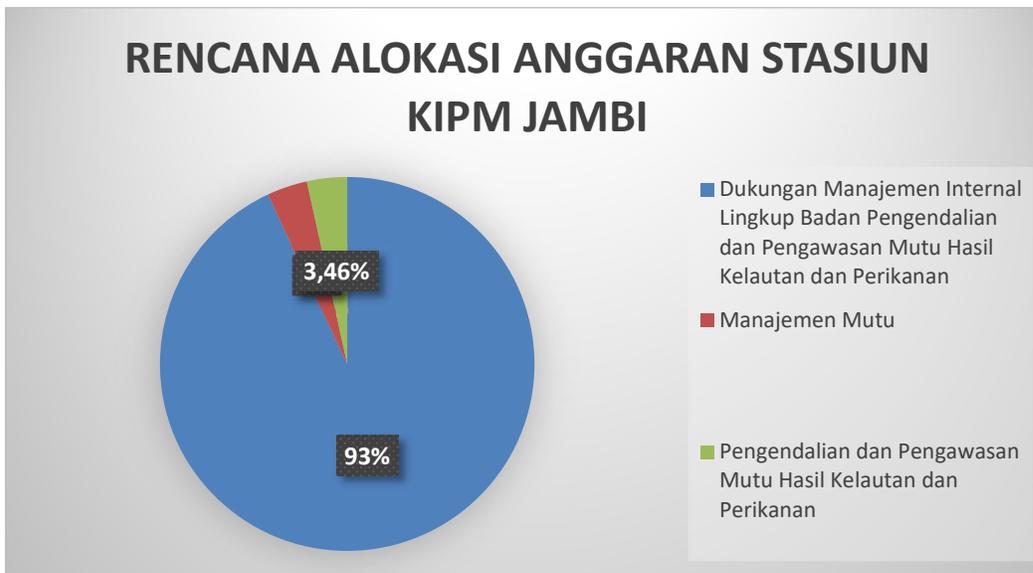
## 2.4. Rencana Kinerja dan Anggaran Stasiun KIPM Jambi

Rencana Kinerja dan anggaran Stasiun KIPM Jambi tahun 2025 diarahkan untuk mencapai target-target Kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program inovatif serta rencana Kinerja Stasiun KIPM Jambi dalam

Mendukung visi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alokasi Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.4,766,439,000,-

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Stasiun KIPM Jambi tahun 2025 untuk mewujudkan target-target Kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu kembali kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif, efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada grafik 1 dan 2 sebagai berikut.

**Grafik 1. Alokasi Anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi per jenis KRO**



Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025 sebesar Rp. 4,766,439,000,-Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4.434.439.000,- (93,03 %)
2. Kegiatan Manajemen Mutu sebesar Rp. 167.000.000,- (3,51 %)
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 165.000.000,- (3,46 %)

Sedangkan rincian masing-masing kegiatan dituangkan dalam Rincian Output (RO) kegiatan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi, terdiri dari :

1. Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor-nya sebesar Rp.5.000.000
2. Produk kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang divalidasi sebesar Rp.45.000.000
3. Lembaga kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang divalidasi Rp. 80.000.000
4. Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya sebesar Rp. 25.000.000
5. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp.10.000.000
6. Rekomendasi Kebijakan Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp. 5.000.000
7. Bimbingan Teknis Peningkatan sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan sebesar Rp. 8.500.000
8. Rekomendasi Kebijakan Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan sebesar Rp. 80.000.000
9. Unit kerja yang menerapkan standar sistem pengujian mutu sebesar Rp. 25.000.000
10. Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen mutu Laboratorium sebesar Rp.40.000.000

11. Unit/Usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi sebesar Rp. 8.500.000
12. Layanan Umum sebesar Rp. 103.880.000
13. Layanan Perkantoran sebesar Rp. 4.256.679.000
14. Layanan Perencanaan dan Penganggaran sebesar Rp. 53.328.000
15. Layanan Manajemen Keuangan sebesar Rp. 20.552.000

**Grafik 2. Alokasi anggaran Stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi per jenis belanja**



Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.766.439.000,-. Alokasi anggaran tersebut berdasarkan jenis belanja terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.586.646.000 atau sebesar 54,27 %
2. Belanja Barang sebesar Rp. 2.179.793.000 atau sebesar 45,73 %
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0 %

### 3. PENUTUP

Program Kinerja Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada TA 2025 pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi diimplementasikan dalam rangka penerapan Kinerja berbasis *balanced scorecard* (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program tersebut ditujukan dalam rangka mewujudkan sasaran strategis antara lain :

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya sistem perkarantinaan dan pengendalian keamanan hayati ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif.
7. Terwujudnya aparatur sipil negara pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi yang kompeten, profesional dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi yang handal dan mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN) pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi secara efisien dan akuntabel

Total rencana alokasi anggaran Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi pada tahun 2025 sebesar Rp. 4.766.439.000,-.. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari :

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.586.646.000 atau sebesar 54,27 %
2. Belanja Barang sebesar Rp. 2.179.793.000 atau sebesar 45,73 %
3. Belanja Modal sebesar Rp. 0,- atau sebesar 0%

Sedangkan rincian alokasi anggaran Alokasi anggaran berdasarkan indikator kegiatan antara lain :

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 4.434.439.000,- (93,03 %)
2. Kegiatan Manajemen Mutu sebesar Rp. 167.000.000,- (3,51 %)
3. Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 165.000.000,- (3,46 %)

Demikian Rencana Kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi Tahun Anggaran 2025 dalam mewujudkan "*Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman konsumsi dan terpercaya*".